**PENYELESAIAN SECARA KEKELUARGAAN TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI WHATSAPP
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
(STUDI KASUS SMKN 1 BANJAR DAN SMKN 2 BANJAR)**

Ado Harmawan^{*)}

Adoharmawan@student.unigal.ac.id

Anda Hermana^{*)}

anda.hermana@unigal.ac.id

Yuliana Surya Galih^{*)}

Yuge71@gmail.com

ABSTRACT

Criminal acts of defamation committed through social media, including the offense of complaints, can be resolved through legal processes but can be resolved through amicable or deliberative discussions at both the police and prosecutor levels, in which case the case is resolved amicably, as is the case with Restorative Justice as regulated in Article 1 paragraph (3) of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts based on Restorative Justice. This research is limited to identifying the problem of amicable resolution of criminal acts of defamation via WhatsApp in connection with Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (Case Study of SMKN 1 Banjar and SMKN 2 Banjar). The obstacles and efforts made in amicably resolving criminal acts of defamation via WhatsApp are linked to Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law Number 19 of 2008 2016 concerning Information and Electronic Transactions (Case Study of SMKN 1 Banjar and SMKN 2 Banjar). The research method used is the Descriptive Analytical method, which is a way to solve problems or answer the problems being

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

faced and uses a normative juridical approach method. The results of the research show that the amicable resolution of criminal acts of defamation via WhatsApp is linked to Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. carried out in a family manner between two female students of SMKN 1 Banjar and representatives of SMKN 2 Banjar which was held at SMKN 1 Banjar, both parties agreed to make peace by making a video explaining the apology and not continuing with the legal process.

Keywords: *Family, Crime, Whatsapp*

ABSTRAK

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial, termasuk delik aduan dapat diselesaikan dengan proses hukum tetapi bisa diselesaikan melalui secara kekeluargaan atau musyawarah baik di tingkat kepolisian dan kejaksaan yang di dalam perkara tersebut penyelesaian secara kekeluargaan seperti sama halnya dengan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini dibatasi dengan identifikasi masalah penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui whatsapp dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar). Kendala-kendala dan Upaya-upaya yang dilakukan dalam penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui whatsapp dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar). Metode penelitian yang dilakukan adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi serta menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui whatsapp dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dilaksanakan secara kekeluargaan antara dua siswi SMKN 1 Banjar dengan perwakilan SMKN 2 Banjar yang diadakan di SMKN 1 Banjar kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dengan membuat video klarifikasi permintaan maaf dan tidak melanjutkan ke proses hukum.

Kata Kunci : Kekeluargaan ,Tindak Pidana, Whatsapp

I. Pendahuluan

Di Era Teknologi saat ini yang semakin canggih membuat banyak orang dari berbagai jenjang usia dari balita, usia muda hingga usia tua sudah mampu beradaptasi dengan teknologi saat ini seperti Gadget/ *Smartphone*, teknologi tersebut memudahkan kita untuk mengakses dalam jangkauan jauh dan dikemas dengan menggunakan berbagai aplikasi sehingga orang-orang memiliki ketertarikan akan menggunakan *smartphone* tersebut.

Kegiatan manusia semakin bervariasi, hal tersebut adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi. Kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik. Namun, pada era teknologi informasi kegiatan manusia kini didominasi oleh peralatan yang berbasis teknologi informasi. Hal tersebut memberikan dampak pada penegakan hukum pidana, kejahatan dalam dunia maya seperti judi *online*, penipuan *online* dan pencemaran nama baik kerap terjadi.

Bijak menggunakan media sosial yakni mengerti bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses, berekspresi, dan merasa nyaman dalam era digital, menjaga hak-hak dan reputasi orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban masyarakat, kesehatan dan moral publik, maka diperlukan etika digital (*Digital Ethics*) yakni kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital (*netiquette*) dalam kehidupan sehari-hari. Etika bermedia sosial yang harus diketahui dan untuk diajarkan kepada anak yaitu hati-hati dalam menyebarkan informasi pribadi (privasi) ke publik, gunakan etika atau norma saat berinteraksi dengan siapapun di media sosial.¹⁾

Akses internet dan sosial media yang semakin mudah dijangkau, serta kebebasan berekspresi yang tidak bertanggung jawab membuat pencemaran nama baik semakin lumrah ditemukan. Dalam hukum positif Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁾

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan suatu pelanggaran dan dijerat dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

¹⁾ Ridwan Muzir. (2021). *Hindari Penyalahgunaan Teknologi*. Tangerang Selatan. Diakses 17 September 2022. Doi: <https://kilaskementerian.kontan.co.id>

²⁾ Issha Haruma. (2022). *Undang-Undang Yang Mengatur Pencemaran Nama Baik*. Diakses 17 September 2022. Doi: <https://amp.kompas.com>

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Adapun untuk ancaman hukuman bagi pelanggaran pasal 27 ayat (3) ini adalah penjara maksimum 6 (enam) tahun dan/atau denda 1 miliar rupiah namun terdapat perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009. Dalam pertimbangan Putusan MK 50/PUU-VI/2008 disebutkan bahwa keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai *genius delict* yang mensyaratkan adanya pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut, harus juga

diperlakukan terhadap perbuatan yang dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga Pasal *a quo juga* harus ditafsirkan sebagai delik yang mensyaratkan pengaduan (*klacht*) untuk dapat dituntut di depan Pengadilan.³⁾

Jika merujuk pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik.

Tindak pidana pencemaran nama baik itu diselesaikan dengan proses hukum tetapi bisa diselesaikan melalui secara kekeluargaan atau musyawarah baik di tingkat kepolisian dan kejaksaan yang di dalam perkara tersebut penyelesaian secara kekeluargaan seperti sama halnya dengan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi :

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Adapun yang menjadi syarat untuk bisa dilakukan restoratif justice terbagi menjadi 2 yaitu syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 5 yang berbunyi :
Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;

³⁾ Riki Perdana Raya Waruwu. Mahkamah Agung Republik Indonesia : Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Facebook. Diakses 5 Desember 2022. Doi: https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikelhukum/2452-aspek-hukum-pencemaran_nama-baik-melalui-facebook.html

- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. Bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan;
dan
- f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara,
Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Selanjutnya syarat formil sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi : Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba;
dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggungjawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

Menurut Eva Achjani Zulfa, paradigma *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana membawa banyak keuntungan atau perubahan yang positif terhadap masyarakat dan negara.⁴⁾

Salah satu kasus mengenai pencemaran nama baik yaitu perselisihan antara Sekolah Menengah Kejuruan di SMKN 1 Banjar dengan SMKN 2 Banjar, berawal dipicu dari video berdurasi 15 detik yang menampilkan dua siswi berhijab dengan seragam putih abu-abu yang merupakan siswi SMKN 1 Banjar meluapkan kekesalannya dengan mengeluarkan ujaran kebencian dan diunggah dalam status/*story* whatsapp oleh akun salah satu siswi tersebut. Dalam video tersebut salah satu siswi tersebut menyebutkan bahwa SMKN 2 Banjar sebagai sekolah beban. Rupanya, kedua siswi SMKN 1 Banjar ini kecewa usai dibatalkannya program kunjungan industri di SMKN 1 Banjar. Mereka meluapkan kekesalannya ke SMKN 2 Banjar yang sebelumnya telah ditegur Satgas Penanganan Covid-19 Kota Banjar akibat tidak menjalankan proses saat

⁴⁾ Eva Achjani Zulfa. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit FH UI. hlm. 2.

berwisata ke Yogyakarta dan diduga menjadi salah satu alasan sekolah lain diminta menunda pelaksanaan kegiatan serupa. Ujaran kebencian keduanya mengundang reaksi dari para siswa SMKN 2 Banjar, gerombolan siswa SMKN 2 Banjar meradang dan menggeruduk sekolah kejuruan tersebut pada Rabu tanggal 23 Februari 2022. Puluhan motor yang ditumpangi siswa SMKN 2 Banjar kemudian menerobos masuk ke lingkungan SMKN 1 Banjar dan kejadian tersebut dalam sekejap viral di media sosial. Menyikapi permasalahan tersebut, pihak Kepolisian dari Polres Banjar, Polsek Banjar dan Purwaharja, TNI, dan Kecamatan di kedua sekolah tersebut turun tangan dan langsung bergerak sigap menyelesaikan aksi yang berasal dari video siswi SMKN 1 Banjar tersebut. Setelah melalui proses mediasi, akhirnya kedua sekolah menyepakati perdamaian dan kedua siswi SMKN 1 Banjar langsung membuat video ucapan permintaan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan:

1. Bagaimana penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui whatsapp dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar) ?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang terjadi dalam penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui whatsapp dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar) ?
3. Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui whatsapp

dihubungkan dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar) ?

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan objektif.⁵⁾ Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁶⁾

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang membuat perasaan seseorang menjadi tidak enak, menjadi nama baiknya tercemar dihadapan publik. Pencemaran nama baik itu sendiri sebelumnya telah diatur didalam KUHP, akan tetapi pencemaran nama baik yang diatur didalam KUHP harus dilakukan secara terbuka dan nyata, bukan dilakukan di dunia virtual.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, dengan munculnya berbagai jenis media sosial, tindak pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik bisa dilakukan dimedia sosial tersebut.

⁵⁾ Winarno Surachamad. 1986. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsido. hlm. 139.

⁶⁾ J. Suparto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta. hlm. 1.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan Teknologi Informasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menetapkan 8 pasal ketentuan pidana, ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tersebut dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik perubahan tersebut yaitu Pasal 45 dan penambahan Pasal 45 A dan 45 B yang kesemuanya berfungsi menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*). Adapun satu diantaranya adalah Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perubahan elemen dasar ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 terkait penghinaan/pencemaran nama baik adalah lamanya pemidanaan yang berkurang dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi 4 (empat) tahun sedangkan denda dari semula 1 miliar menjadi 750 juta. Adapun dampak berkurangnya ancaman pidana tersebut maka tersangka/terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum maupun hakim.

Selain itu, terdapat perubahan penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 yang sebelumnya tertulis “jelas” kemudian di dalam penjelasan Pasal 27 Undang-Undang

Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 menjadi “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini semakin memperjelas 1). makna pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana diatur dalam KUHP serta 2). merubah sifat delik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib. Muatan norma penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 secara tidak langsung mengadopsi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI-2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009.

Media sosial merupakan salah satu media instan yang saat ini memang memiliki berbagai fungsi dalam perannya. Selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, media massa juga menjadi sarana untuk penggunaanya dalam menggali beberapa informasi. Definisi media sosial tidak serta merta merupakan gagasan yang tidak berdasar yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, media sosial memiliki peran dan dampak bagi kehidupan masyarakat yang harus didesain sedemikian rupa agar media sosial tetap pada fungsi dan tujuan media sosial itu sendiri dan memiliki manfaat dalam kehidupan setiap individu.

Seperti yang dikemukakan oleh Henderi, bahwa pengertian media sosial adalah situs jaringan sosial berbasis web yang memungkinkan bagi setiap individu untuk membangun profil publik ataupun semi publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat serta

menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem.⁷⁾

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stake holders*).

Bagir Manan : Secara umum pengertian restorative justice adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.⁸⁾

Pada prinsipnya, Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) mengupayakan perdamaian diluar pengadilan yang melibatkan pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban. Dalam Keadilan *Restoratif*, penyelesaian suatu permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku dan korban tindak pidana dapat dicapai apabila telah adanya persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak sehingga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.⁹⁾

Didalam pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan :

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁷⁾ Henderi, Muhammad Yusuf dan Yuliana Isma Graha. (2007). Pengertian Media Sosial (Online). Diakses 9 Januari 2023. Doi: <http://wlipurn.blogspot.co.id/2017/04/wlipurn.html>

⁸⁾ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hlm. 3.

⁹⁾ Zevanya Simanungkalit, 2016. Skripsi: *Analisis Hukum Terhadap Penerapan Restorative Justice dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Makassar:UNHAS. hlm. 16

Kemudian Kepala Kepolisian Indonesia telah mengeluarkan Peraturan yang mengatur tentang *Restorative Justice*, melalui Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

Menurut pasal 1 angka 3 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan:

Keadilan *Restoratif* adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kemudian pasal 2 ayat (1) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan:

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan :

- a. Penyelenggaraan fungsi reserse kriminal
- b. Penyelidikan
- c. Penyidikan.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021, telah disyaratkan syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk dapat dilakukan penyelesaian perkara melalui *Restoratif Justice*, yaitu :

1. Tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat.
2. Tidak berdampak konflik sosial
3. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
4. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme
5. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan dan
6. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa.

3.2. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Whatsapp Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2008 penghinaan/pencemaran nama baik merupakan delik biasa sehingga dapat diproses secara hukum sekalipun tidak adanya pengaduan dari korban namun dengan mengacu pada KUHP sebagaimana maksud Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2016 maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan (*klacht delict*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib.

Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penghinaan yang dapat dipidana harus dilakukan dengan cara sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti dimaksudkan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tuduhan tersebut harus dilakukan dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dugaan tindak pidana pencemaran yang dilontarkan oleh pelaku terhadap instansi sekolah yang diserang nama baiknya mengakibatkan nama baik sekolah merasa tercemar dan yang hanya bisa merasakan nama baiknya tercemar tersebut ialah seseorang/ninstansi yang dicemarkan nama baiknya dan bukanlah pihak

lain yang merasakannya, sehingga Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan dan Transaksi Elektronik merupakan delik aduan (*klacht delic*) yang mengharuskan korban membuat pengaduan kepada pihak yang berwajib.

Dalam hal ini yang dituduhkan bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, cukup hanya perbuatan yang membuat nama baik seseorang/instansi tercemar maka pelaku dapat dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik. Karena yang terpenting unsur–unsur obyektif dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses, melawan hukum, yang dilakukan tanpa hak, obyeknya adalah elektronik atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Sedangkan unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang dengan sengaja sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan dua sekolah yaitu SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB SMKN 1 Banjar, dua orang siswi SMKN 1 Banjar telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan pihak SMKN 2 Banjar merasa tercemar nama baiknya dan merasa terganggu, dengan adanya kejadian tersebut pihak SMKN 2 Banjar merasa dirugikan.

Kasus dugaan Pencemaran nama baik karena yang terlibat peristiwa tersebut melibatkan siswa/ siswi dua sekolah yaitu dua siswi SMKN 1 Banjar dengan Siswa SMKN 2 Banjar, maka perlu dilakukan penyelesaian tanpa harus menempuh jalur hukum.

Berdasarkan musyawarah terhadap dua siswi SMKN 1 Banjar dan para saksi yaitu Bapak Sudihartono, S.Sos selaku Kapolsek Banjar, Bapak M. Taufik S.Ip.,AKD. Selaku Kapolsek Purwaharja, Bapak Asep Y. Taruna, S.H.,M.Ap. selaku Camat Banjar, Bapak Jajat Sudrajat selaku Camat Purwaharja dan dihadiri

Bapak Dede Ruslianto, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Banjar dan Bapak Dedi Satriadi, S.Pd.,M.Pd. selaku Wakasek Kesiswaan SMKN 2 Banjar serta kedua ketua OSIS dari masing-masing sekolah yaitu Aditya Nugraha selaku Ketua OSIS SMKN 1 Banjar dan Shahrani Nurfadillah selaku Ketua OSIS SMKN 2 Banjar yang disangkakan menyatakan telah terjadi kesalahpahaman, dua siswi tersebut telah meminta maaf dengan membuat video klarifikasi atau konperensi pers dan membuat surat perjanjian perdamaian antara kedua sekolah tersebut kepada SMKN 2 Banjar. Hal ini disebabkan pencemaran nama baik merupakan tindak pidana dengan delik aduan dimana ada suatu pengaduan dari orang/instansi yang nama baiknya dirugikan dan tercemar.

Dalam mengatasi permasalahan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh siswi SMKN 1 Banjar terhadap SMKN 2 Banjar cara pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan ialah melalui perdamaian atau mediasi dengan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) yang hanya dikenal dalam penyelesaian di tingkat penyidikan maupun penuntutan akan tetapi penyelesaian diluar tingkat penyidikan dan penuntutan melalui upaya damai dapat juga dikualifikasikan *restorative justice* artinya penyelesaian dengan melibatkan kedua belah pihak yang bersengketa atau berperkara dengan bantuan seorang mediator atau seorang penengah.

Mediasi atau perdamaian yang telah mencapai kesepakatan, hasilnya akan dituangkan dalam surat perdamaian yang ditanda tangani diatas materai 10.000 oleh Bapak Dede Ruslianto, S.Pd.,M.Pd. selaku Kepala Sekolah SMKN 1 Banjar, Bapak H. Dedi Satriadi, S.Pd.,M.Pd. selaku Wakasek Kesiswaan SMKN 2 Banjar, oleh yang bersangkutan yaitu dua siswi tersebut, oleh Ketua OSIS SMKN 1 Banjar dan Ketua OSIS SMKN 2 Banjar, serta para saksi dari aparat kepolisian dan tokoh masyarakat seperti Bapak Sudihartono, S.Sos selaku Kapolsek Banjar, Bapak M. Taufik S.Ip.,AKD. Selaku Kapolsek Purwaharja,

Bapak Asep Y. Taruna, S.H.,M.Ap. selaku Camat Banjar, Bapak Jajat Sudrajat selaku Camat Purwahaerja agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan pelaku meminta maaf dalam konferensi pers dengan membuat video klarifikasi atas permintaan maaf kepada SMKN 2 Banjar maka permasalahan tersebut selesai.

3.3. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Whatsapp Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pencemaran nama baik berkaitan dengan suatu kata penghinaan. Pada dasarnya, penghinaan adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang, dalam hal ini, bukan dalam arti seksual, sehingga orang itu merasa dirugikan.

Penghinaan dalam KUHP diatur pada Bab XVI yang di dalamnya terdapat rumpun pencemaran nama baik. Secara umum penghinaan merupakan keadaan seseorang yang dituduh atas sesuatu hal yang benar faktanya namun bersifat memalukan karena diketahui oleh umum sebagaimana dimaksud Pasal 310 ayat (1) KUHP dan kebalikannya apabila yang dituduhkan itu tidak benar maka dianggap melakukan fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana maksud dalam Pasal 311 ayat (1) KUHP. Apabila penghinaan itu dilakukan dengan jalan lain selain menuduh suatu perbuatan”, misalnya dengan mengatakan memakai kata-kata panggilan binatang dan sebagainya, masuk Pasal 315 KUHP dan dinamakan penghinaan ringan.

Kendala-Kendala dalam Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Whatsapp Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain :

- a. Terjadinya emosional para siswa terutama para siswa SMKN 2 Banjar, informasi teknologi saat ini cepat menyebar dan ada pihak (alumni) yang memprovokasi permasalahan tersebut sehingga emosional siswa tidak terjaga maka dari itu pelunya menjaga serta mencegah emosional siswa agar tidak membuat hal kegaduhan yang akan menimbulkan permasalahan baru dalam kasus ini.
- b. Pemahaman *Restorative Justice System* bagi masing-masing instansi baik itu SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar serta para saksi yang hadir masih perlu ditingkatkan kualitas pemahaman.
- c. Tidak pernah melaksanakan sosialisasi dari pihak kepolisian dan pemerintah tentang penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud oleh asas *restorative justice system*.
- d. SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar masih belum memahami mengenai batasan kasus apa saja yang diatur di dalam perkara Pasal berapa saja yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

Adanya kendala-kendala tersebut, perlu diberikannya pemahaman tentang penggunaan media sosial secara bijak khususnya kepada siswa-siswa, tidak menggunakan media sosial secara emosional, karena apa yang diungkapkan didalam media sosial dan bertujuan menyerang kehormatan seseorang, maka bisa jadi perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana.

Apabila sudah menjadi suatu tindak pidana, maka proses hukum tentunya akan dilaksanakan, apabila ada pihak yang merasa kepentingan atau kehormatannya terganggu, namun tidak semua tindak pidana harus dilakukan proses hukum, sepanjang tindak pidana tersebut tidak menimbulkan keresahan masyarakat, *restorative justice* adalah salah satu model penyelesaian tindak pidana dengan cara kekeluargaan, semua pihak baik guru, siswa siswi yang ada didalam

permasalahan tersebut harus memahami bahwa penyelesaian dengan cara kekeluargaan adalah mencari solusi yang terbaik, bagi semua pihak.

3.4. Upaya-Upaya Dalam Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Whatsapp Dihubungkan Dengan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Upaya-Upaya dalam Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Whatsapp Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain :

1. Upaya preemtif adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak kejahatan.
2. Upaya persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.
3. Upaya damai, apabila perkara yang dilakukan dua siswi SMKN 1 Banjar terhadap SMKN 2 Banjar yang bermuatan pencemaran nama baik dinaikan ke proses hukum maka akan menimbulkan dampak,

upaya damai menjadi salah satu untuk mencegah agar setiap perkara itu tidak selalu naik ke pengadilan.

4. Kedua instansi sekolah antara SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar melakukan mediasi terhadap dua siswi yang telah membuat video bermuatan pencemaran nama baik yang dihadiri oleh aparat Kepolisian yaitu Polsek Banjar dan Polsek Purwahaerja, Kepala Sekolah SMKN 1 Banjar, Wakasek Kesiswaan SMKN 2 Banjar dan Ketua OSIS dari masing-masing instansi sekolah beberapa tokoh masyarakat seperti Camat Banjar dan Camat Purwahaerja serta orangtua dari kedua siswi tersebut maka disarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan.
5. Di SMKN 1 Banjar dan wilayah titik kumpul anak seperti Taman Kota Banjar (Tamkot), Taman Lansia. 2 hari setelah peristiwa itu terjadi pembina dari masing-masing sekolah memantau serta mengerahkan baik aparat Kepolisian Polsek Banjar dan Polsek Purwahaerja dikhawatirkan akan terjadi pengerahan massa kembali dari SMKN 2 Banjar.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelesaian Secara Kekeluargaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Whatsapp Dihubungkan Dengan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar), adalah sebagai berikut : Dilaksanakan secara kekeluargaan antara dua siswi SMKN 1 Banjar dengan Bapak H. Dedi Satriadi, S.Pd.,M.Pd. selaku Wakasek Kesiswaan SMKN 2 Banjar dan sebagai perwakilan SMKN 2

Banjar yang diadakan di SMKN 1 Banjar kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak melanjutkan permasalahan tersebut secara hukum yang dituangkan dalam surat kesepakatan bersama walaupun secara hukum tidak adanya kepastian hukum.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui whatsapp dihubungkan dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar), antara lain siswa siswa lebih mengedepankan emosional didalam melakukan tindakan dan kurang bijak didalam menggunakan media sosial sehingga meluapkan emosional yang tidak terkontrol menimbulkan adanya pihak-pihak yang merasa kehormatannya atau nama baiknya terganggu dan dirugikan yang berdampak kepada terjadinya suatu tindak pidana.

Pemahaman penyelesaian tindak pidana yang dapat dilakukan melalui pendekatan restoratif justice kurang dipahami oleh semua pihak, seperti instansi baik itu SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar serta para saksi yang hadir masih perlu ditingkatkan kualitas pemahaman dan kurangnya sosialisasi mengenai penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana dimaksud oleh asas *restorative justice system*.

3. Upaya-upaya dalam penyelesaian secara kekeluargaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui whatsapp dihubungkan dengan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus SMKN 1 Banjar dan SMKN 2 Banjar), yaitu sebagai berikut Upaya preemtif adalah suatu upaya-upaya awal yang dilakukan

oleh aparat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik, sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi tindak kejahatan. upaya persuasif, merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara membujuk, secara damai, dan tanpa paksaan, untuk mengarahkan individu atau masyarakat agar mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku. Dan Upaya damai, seperti yang terjadi didalam perkara dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi antara dua siwi SMKN 1 Banjar terhadap SMKN 2 Banjar yang bermuatan pencemaran nama baik dinaikan ke proses hukum maka akan menimbulkan dampak, upaya damai menjadi salah satu untuk mencegah agar setiap perkara itu tidak selalu naik ke pengadilan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Kepada sekolah agar diadakannya sosialisasi atau penyuluhan hukum untuk siswa siswi seluruh SLTA secara umum agar memahami mengenai adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kepada guru-guru harus memberikan pemahaman mengenai adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang lebih kepada siswa siswinya bahwa pentingnya menjaga etika di media massa.
3. Kepada kepolisian agar memberikan sosialisasi atau penyuluhan hukum untuk siswa siswi seluruh SLTA secara umum agar memahami mengenai adanya Undang-Undang yang mengatur tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik sehingga siswa siswi dapat menjaga etika dan bijak menggunakan media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bassar, M. Sudradjat. 1984. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung: Remadja Karya.
- Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Puntoadi dan Danis (2011). *Menciptakan Penjualan Melalui Media Sosial*. Jakarta: PT Elex Komputindo.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sianturi, SR. 1986 *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Surakhmad, Winarno. 2010. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zarella, 2010. *The Social Media Marketing Book*. USA: Oreilly Media.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Bahan Penerbit FH UI.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Sumber-sumber lainnya :

- Riki Perdana Raya Waruwu (2017) Mahkamah Agung Republik Indonesia :
Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui Facebook. Diakses 5
Desember 2022. Doi :
<https://badilum.mahkamahagung.go.id/artikelhukum/2452-aspek-hukum-pencemaran-nama-baik-melalui-facebook.html>

- Henderi, Muhammad Yusuf, Yuliana Isma Graha. (2007). Pengertian Media Sosial (Online). Diakses 9 Januari 2023. Doi: <http://wlipurn.blogspot.co.id/2017/04/wlipurn.html>
- Issha Haruma. (2022). Undang-Undang Yang Mengatur Pencemaran Nama Baik. Diakses 17 September 2022. Doi: <https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/04/19/00150091/undang-undang-yang-mengatur-pencemaran-nama-baik>
- Ridwan Muzir. (2021). Hindari Penyalahgunaan Teknologi. Diakses 17 September 2022. Doi: <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/hindari-penyalahgunaan-teknologi>